

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Oleh karenanya, pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan perkapita, namun harus pula melihat bagaimana pendapatan tersebut di distribusikan kepada penduduk dan mengetahui siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan tersebut. Pertumbuhan ekonomi belum dapat dikatakan berhasil jika beban sosial semakin berat, pengangguran semakin meningkat, distribusi pendapatan tidak merata dan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan juga semakin meningkat, Todaro (2000).

Menurut Todaro (2000) pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian, salah satu diantaranya dari tingkat pengangguran. Melalui tingkat pengangguran kita dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat serta tingkat distribusi pendapatan. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya, Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja.

Melihat Tabel 1.1 dapat diketahui jumlah penduduk angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dari tahun-ketahun. Dimulai pada tahun 2004 sebesar 5.514.170 jiwa. Pada tahun 2005 menaik menjadi 5.803.112 jiwa dan pada tahun 2006 jumlah penduduk angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan kembali menjadi 5.491.696 jiwa. Hingga pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 6.271.083 jiwa. Berikut ini adalah jumlah penduduk angkatan kerja, jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2004 hingga tahun 2014.

Tahun	Angkatan Kerja (jiwa)			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
2004	4.756.078	758.092	5.514.170	13,75
2005	5.166.132	636.980	5.803.112	10,98
2006	4.859.647	632.049	5.491.696	11,51
2007	5.082.797	571.334	5.654.131	10,10
2008	5.540.263	554.539	6.094.802	9,10
2009	5.765.643	532.427	6.298.070	8,45
2010	6.125.571	491.125	6.617.377	7,43
2011	5.912.114	402.125	6.314.239	6,37
2012	5.751.682	379.982	6.131.664	6,20
2013	5.899.560	412.202	6.311.762	6,53
2014	5.881.371	390.712	6.271.083	6,23

Tabel 1.1: Jumlah Penduduk Angkatan Kerja, Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2014.

Sumber : BPS-Survei Angkatan Kerja Nasional bulan Agustus 2004-2014

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dari tahun-ketahun. Dimulai pada tahun 2004 sebesar 13,75% sampai pada tahun 2014 sebesar 6,23%. Persentase tingkat pengangguran terbuka paling tinggi dalam tabel tersebut terjadi pada tahun 2004, dimana tingkat pengangguran terbuka mencapai 13,75%. Sementara tingkat pengangguran terbuka di tahun 2012 merupakan tahun dengan tingkat pengangguran terbuka terendah dalam tabel tersebut, yaitu sebesar 6,20%.

Tingginya angka pengangguran biasanya disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia ataupun tingginya kriteria rekrutmen penawaran kesempatan kerja yang ada. Saat ini banyak perusahaan yang mencari tenaga kerja dengan pendidikan minimal diploma ataupun sarjana. Keadaan ini membuat sebagian penduduk merasa tidak mampu dan tidak memiliki kesempatan memasuki dunia kerja. Jumlah penduduk yang semakin tinggi juga menjadi salah satu faktor semakin tingginya jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan data BPS menunjukkan jumlah penduduk provinsi sumatera utara yang mengalami kenaikan dari tahun-ketahun. Dimulai pada tahun 2004 sebesar 11.649.655 jiwa sampai pada tahun 2014 sebesar 13.766.851 jiwa (BPS, 2004 dan 2014). Kenaikan tersebut juga diikuti oleh kenaikan jumlah pengangguran, hal ini menunjukkan kenaikan jumlah penduduk tidak terserap ke lapangan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran pun naik.

Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator. Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan, tingkat inflasi, serta besaran upah yang berlaku. Apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran pula. Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran, Sukirno (2008).

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengangguran adalah dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang artinya jumlah pengangguran akan menurun. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi turun maka pengangguran akan meningkat, Dornbusch (2008). Menurut Adisasmita (2011) berpendapat bahwa indikator yang dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS (2013) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB mempunyai hubungan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Barang dan jasa akhir yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang diminta. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. Produk Domestik regional Bruto (PDRB) atas harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Tabel 1.2 Berikut menggambarkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 di Provinsi Sumatera Utara dan tingkat pengangguran terbuka.

Tahun	PDRB Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2004	83.328,94	13,75
2005	87.897,79	10,98
2006	93.347,40	11,51
2007	99.792,27	10,10
2008	106.172,27	9,10
2009	111.559,22	8,45
2010	118.640,90	7,43
2011	126.590,21	6,37
2012	134.460,10	6,20
2013	142.537,12	6,53
2014	149.991,81	6,23

Tabel 1.2: PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2014.

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, BPS

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka di provinsi sumatera utara dalam periode 2004-2014. Tingkat pengangguran di provinsi sumatera cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun pada periode waktu tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di provinsi sumatera utara yang cenderung besaran PDRB terus naik antara tahun 2004-2014. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya tingkat pengangguran dan jumlah pengangguran yang terjadi di provinsi sumatera utara akan mengalami penurunan besaran PDRB.

Hubungan Pertumbuhan ekonomi dengan Pengangguran dijelaskan oleh Hukum Okun. Teori ini menyatakan bahwa ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi (dalam hal ini PDB) dengan pengangguran. Hukum okun menyatakan bahwa setiap adanya peningkatan terhadap persentase pengangguran dalam suatu daerah maka hal tersebut akan setara dengan terjadinya penurunan besarnya PDB riil sebesar 2 persen. Jika terjadi peningkatan output nasional/daerah dalam hal ini pertumbuhan ekonomi maka akan menyebabkan permintaan tenaga kerja naik dan pengangguran turun. Sebaliknya jika PDB riil turun maka akan menyebabkan output yang diproduksi turun. Turunnya produksi mengakibatkan produsen mengurangi kapasitas produksi dan memaksa produsen mengurangi input dalam hal ini tenaga kerja yang akhirnya pengangguran meningkat, Dornbusch (2008).

Indikator ekonomi selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran adalah Inflasi. Inflasi merupakan suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus, Nanga (2001). Dari pengertian tersebut maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, maka kenaikan harga yang sementara sifatnya tersebut tidak dapat dikatakan inflasi. Sedangkan tingkat inflasi adalah persentasi kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu, Sukirno (1994). Semakin tingginya tingkat inflasi yang terjadi dapat berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun, sehingga akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran.

Inflasi yang terjadi karena adanya tarikan permintaan (*demand pull*) secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah pengangguran. Sesuai dengan hukum permintaan, apabila permintaan akan suatu barang meningkat, maka harga barang itu sendiri akan meningkat dikarenakan terbatasnya ketersediaan barang tersebut. Pada kondisi tersebut produsen akan berusaha memenuhi permintaan pasar dengan meningkatkan kapasitas produksinya. Peningkatan kapasitas produksi ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja, Sukirno (2000).

Tahun	Laju Inflasi Kumulatif (%)	Upah Minimum (Rupiah)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2004	6,80	537.000	13,75
2005	22,41	600.000	10,98
2006	6,11	737.800	11,51
2007	6,60	761.000	10,10
2008	10,72	822.200	9,10
2009	2,61	905.000	8,45
2010	8,00	965.000	7,43
2011	3,67	1.035.500	6,37
2012	3,86	1.200.000	6,20
2013	10,18	1.375.000	6,53
2014	8,17	1.505.900	6,23

Tabel 1.3: Laju Inflasi Kumulatif, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2014.

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, BPS

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, dapat diketahui bahwa laju inflasi kumulatif di Provinsi Sumatera Utara mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2004 laju inflasi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 6,80% kemudian pada tahun 2005 mengalami kenaikan menjadi 22,41%. Akan tetapi pada tahun 2006 laju inflasi kumulatif Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan kembali menjadi 6,11%

hingga pada tahun 2014 sebesar 8,17%. Laju inflasi kumulatif di Provinsi Sumatera Utara paling tinggi pada tabel diatas terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 22,41%. Meski laju inflasi pada tahun 2005 merupakan laju inflasi tertinggi dalam rentang tahun diatas, ternyata hal tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi di tahun 2004, dimana tingkat pengangguran mencapai angka 13,75%.

A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan harga-harga (inflasi) maka permintaan tenaga kerja meningkat, dan pengangguran berkurang, Samuelson (2003).

Permasalahan utama selanjutnya dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara adalah masalah upah yang rendah dan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena penambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Menurut Mankiw (2000), upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, upah juga merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya.

Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu daerah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada daerah tersebut (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Menurut J.R. Hicks (dalam Kaufman dan Hotchkiss, 1999) Teori penetapan upah dalam suatu pasar bebas sebenarnya merupakan kasus khusus dan teori nilai umum. Upah adalah harga tenaga kerja.

Menurut Gilarso (2003), upah atau balas karya tenaga kerja ada dua segi yang penting, untuk pihak produsen, upah merupakan biaya produksi yang mesti ditekan serendah mungkin. Di sisi lain, untuk pihak pekerja, upah merupakan sumber penghasilan bagi dirinya dan keluarganya, dan dengan demikian juga menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat upah/gaji langsung menyangkut pribadi manusia, harga diri, dan statusnya dalam masyarakat, serta merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat sebagai keseluruhan.

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat hubungan antara tingkat upah minimum dan tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Hubungan tersebut cenderung bersifat negatif. Besaran upah yang ditetapkan pemerintah provinsi Sumatera Utara terus meningkat besarnya tiap tahun. Besarnya upah yang ditetapkan pemerintah provinsi Sumatera Utara pada periode 2004-2014 tersebut selalu meningkat. Pada tahun 2004, tingkat upah yang diterima oleh pekerja sebesar Rp.537.000 sampai tahun 2014 besarnya tingkat upah yang diterima oleh pekerja adalah sebesar Rp.1.505.900 hal ini diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran.

Hal yang tidak kalah penting adalah tingkat pendidikan. Faktor pendidikan kemudian memiliki peranan yang penting terhadap pengangguran. Dimana apabila pendidikan suatu masyarakat rendah dapat berakibat pada meningkatnya tingkat pengangguran di negara tersebut. Demikian pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, skill dan keahlian.

Pengangguran merupakan salah satu tolak ukur sosio ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya pengangguran. Pengangguran yang ada di Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2014 menunjukkan jumlah penduduk yang tergolong penganggur masih cukup tinggi yaitu mencapai 6,23%. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum maksimalnya kebijakan pemerintah Sumatera Utara dalam menanggulangi masalah pengangguran. Diharapkan faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran seperti jumlah angkatan kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi yaitu produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, upah dan tingkat pendidikan dapat meminimalisir pengangguran yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

Pada tahun 2011, penelitian dilakukan oleh Dania Safia Safitri yang berjudul "Pengaruh Inflasi dan PDRB Terhadap Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009". Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dengan program SPSS 17. Dari Hasil penelitian menunjukkan variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah dengan nilai sig. 0.557 sedangkan PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan sebesar 0.04 terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Secara bersama-sama variabel inflasi dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah, hal ini dapat diketahui dari uji F sebesar 2168 dengan nilai sig.0.04, Safia Safitri (2011).

Pada tahun 2014, penelitian dilakukan oleh Cita yang berjudul "Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Kota Ambon". Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode OLS. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa tingkat pengangguran di Kota Ambon dipengaruhi oleh tingkat inflasi, apabila inflasi itu naik sebesar 1% maka jumlah pengangguran meningkat sebesar 8,925618. Tingkat pengangguran dan Pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang berkebalikan, apabila pertumbuhan ekonomi itu naik, maka tingkat pengangguran akan turun dan sebaliknya, Cita (2014).

Pada tahun 2015, penelitian dilakukan oleh Rizka Febiana Putri yang berjudul "Analisis Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013". Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data panel yang diuji dengan metode analisis regresi *doubel log linier* dengan *Generalized Least Square (GLS)*. Hasil penelitiannya adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan upah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran terdidik di provinsi Jawa Tengah, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan sebesar 0.015718, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan sebesar -0.04800, upah berpengaruh negatif dan signifikan sebesar -1.488484, Febiana Putri (2015).

Berdasarkan fenomena inilah yang mendorong peneliti untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana hubungan jumlah angkatan kerja, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi besaran upah minimum yang diterima pekerja yang berlaku, dan pendidikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi Sumatera Utara, apakah

sesuai dengan teori ekonomi yang berlaku ataukah ada fenomena lain yang menyebabkan teori itu tidak bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga judul penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah **"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1978-2014 Dengan Metode *Ordinary Least Square*"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah angkatan kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1978-2014 secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh jumlah angkatan kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1978-2014 secara simultan?

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 1978-2014 (37 tahun) dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*).
2. Pengangguran yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka dengan indikator jumlah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dalam satuan persen.
3. Jumlah angkatan kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dan tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan serta berperan aktif dalam menyumbangkan tenaganya dalam kegiatan produksi dalam satuan jiwa.
4. Inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi yang menunjukkan besarnya perubahan kumulatif harga-harga secara umum dengan indikator IHK (Indeks Harga Konsumen) pada periode waktu tertentu secara tahunan (tahun 1978-2014) dalam satuan persen.

5. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha dalam satuan Miliar rupiah.
6. Besaran upah yang digunakan adalah upah rata-rata minimum propinsi yang ada di provinsi sumatera utara pada periode 1978-2014 dalam satuan rupiah.
7. Pendidikan yang digunakan adalah tingkat pendidikan tamatan menengah atas di provinsi sumatera utara periode 1978-2014 dalam satuan persen.

1.4. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh faktor jumlah penduduk angkatan kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah rata-rata minimum dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara tahun 1978-2014.
2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara tahun 1978-2014.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - (a) Media untuk mencoba menerapkan pemahaman teoritis yang diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan nyata.
 - (b) Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan bahan kajian tentang gambaran/informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan dalam mengurangi jumlah pengangguran sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.



THE
Character Building
UNIVERSITY